

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, KOMITMEN
ORGANISASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL**

(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2015)

Oleh :

Nurwanti Fatimah

Pembimbing : Yessi Mutia dan Mudrika Alamsyah

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : nurwantiyfatimah@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to know the Influence Of The Level Education, Organizational Commitment And Information Technology on the implementation of government accounting standards accrual based. The main problem that researcher descriptions are as follows: to see how many significant relationship between the dependent variable to the independent variable. The results of this research showed that the level of education have influence on the implementation of government accounting standards accrual based, organizational commitment have influence on the implementation of government accounting standards accrual based, and Information Technology have influence on the implementation of government accounting standards accrual based. So that all the hypotheses presented in this research received.

Keywords: government accounting standards, accrual based, implementation, level education, organizational commitment, information technology.

PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi berupa standar akuntansi pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang memiliki landasan hukum dalam

upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan suatu langkah pemerintah untuk peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 merupakan suatu aturan tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan menganut basis kas menuju akrual (cash toward accrual). Komponen laporan keuangan menurut PP No.24 Tahun

2005 terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Peraturan Pemerintah terbaru tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. PP Nomor 71 Tahun 2010 diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri ini diamanatkan diantaranya peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi dimaksud adalah kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan.

Selanjutnya juga dijelaskan peraturan kepala daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang meliputi sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SPKD, SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan. Komponen laporan keuangan menurut PP No.71 Tahun 2010 terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebil, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

tentang SAP berbasis akrua membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrua menjadi basis akrua penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Akuntansi basis akrua adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa akuntansi lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrua waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Laporan keuangan berbasis akrua menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan operasional pemerintah, evaluasi, efisiensi dan efektifitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrua adalah tingkat pendidikan. Tingkat Pendidikan adalah salah satu indikator sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang tinggi akan mampu membantu pegawai dalam menyelesaikan tugas

terutama dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan daerah. Kelemahan pemahaman akan akuntansi sektor publik diperparah dengan rendahnya dorongan untuk belajar lebih jauh dan kesalahan penempatan staf dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai (Nazier, 2009).

Faktor selanjutnya adalah Komitmen dari organisasi, dalam hal ini adalah komitmen dari Pemerintah Daerah. Komitmen dari Pemerintah Daerah merupakan keinginan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Komitmen merupakan hal yang penting dalam penerapan suatu peraturan sebagaimana yang dinyatakan Azhar (2007), Komitmen dari anggota organisasi akan mempercepat keberhasilan penerapan peraturan tersebut. Selain itu dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan dari pemerintah (Sulani, 2009).

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting adalah teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Ketersediaan komputer (*hardware*) dan program-program akuntansi pemerintah (*software*) akan sangat membantu SKPD dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menerapkan SAP.

Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang serta fakta-fakta di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apakah Tingkat Pendidikan yang ada di pemerintahan

Kabupaten Rokan Hulu berpengaruh terhadap implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual? 2. Apakah Komitmen Organisasi yang ada di pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berpengaruh terhadap implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual?

3. Apakah Teknologi Informasi yang diterapkan di pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berpengaruh terhadap implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk menguji pengaruh variabel Tingkat Pendidikan, Komitemen Organisasi, dan Teknologi Informasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang memiliki hasil berbeda satu dengan lainnya dengan penerapan di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. 2. Untuk memperdalam hasil penelitian sebelumnya dengan menambah deskriptif hasil penelitian, sehingga tidak hanya melihat dari hasil uji regresinya.

KAJIAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Faradillah (2013), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintah Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan suatu pedoman yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi mencapai transparansi dan akuntabilitas publik.

Basis Akuntansi Akrua

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP dalam Faradillah (2013) adalah

suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dalam kerangka konseptual Paragraf 42 basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Basis akrual digunakan untuk Laporan Operasional (LO) dan Neraca. Sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun dan dilaksanakan berbasis kas. Bila anggaran disusun berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting*) digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh (*earned*) dan biaya (*expense*) pada saat terjadi (*incurred*), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas.

Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of service* dan *charging of service*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Alasan-alasan penggunaan basis akrual diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup—misalnya transaksi non kas—untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang

dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.

2. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (*full costs of operation*), misalnya keputusan apakah suatu pekerjaan harus dikontrakkan atau dilakukan secara sewa kelola.

3. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

4. Hanya akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya dilaporan berbasis kas.

Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 14 menjelaskan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Komitmen Organisasi

Sulani (2009) menyatakan bahwa komitmen organisasi sebagai

keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Menurut Robbins (2006) komitmen organisasi adalah keadaan dimana pegawai mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sarannya serta berharap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu.

Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (Haryanto, 2012). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Indriasari, 2008). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tingkat pendidikan adalah salah satu indikator dari sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan yang tinggi memungkinkan seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis berbagai pengertian dan konsep (Naja, 2004). Pada dasarnya dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi memiliki pengaruh terhadap pemahaman pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukan, karena dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi, pegawai dapat memahami dan melakukan pekerjaan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Supra (2016) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Sedangkan menurut penelitian Kusuma (2013) Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. Berdasarkan kedua penelitian yang tidak mempunyai hasil yang sama tersebut, maka penulis akan menduga hipotesis sebagai berikut :

H1 : Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual

Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri

individu untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi (Sulani, 2009). Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar organisasi tempat mereka bekerja dapat mencapai keberhasilan.

Bekerja dengan maksimal dalam hal ini antara lain bekerja keras, ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya, senang dan peduli terhadap organisasi tempatnya bekerja. Jika pegawai berkeyakinan bahwa visi dan misi pemerintahan akan tercapai dengan sumbangsih mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan menyebabkan peningkatan kinerja.

Komitmen organisasi berpengaruh pada keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 pada pemerintahan Kabupaten Labuan Batu menurut penelitian Sulani (2009). Sedangkan menurut penelitian Ardiansyah (2013) Komitmen Organisasional tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini karena menurutnya, komitmen organisasi akan mempunyai pengaruh pada saat penerapan SAP akrual yang akan diterapkan pada tahun 2015. Sedangkan saat menjelang penerapan SAP berbasis akrual tersebut, komitmen organisasi tidak berpengaruh. Berdasarkan kedua penelitian yang tidak mempunyai hasil yang sama tersebut, maka penulis akan menduga hipotesis sebagai berikut :

H2 : Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual.

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini berkembang sangat pesat. Perubahan yang terjadi pada teknologi informasi seperti komputer baik pada hardware (*perangkat keras*), dan software (*perangkat lunak*) yang memaksa perusahaan ataupun pemerintah untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi tersebut.

Dalam pelaporan keuangan teknologi yang digunakan juga sudah berkembang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya aplikasi program yang ditawarkan untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan dan dengan adanya ini, maka akan mempermudah SKPD dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan SAP dan dengan penggunaan perangkat pendukung yang optimal, maka akan meningkatkan keefektifitasan dan keefesienan dalam membuat laporan keuangan.

Penelitian Supra (2016) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi akrual. Sedangkan menurut penelitian Kusuma (2013) Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

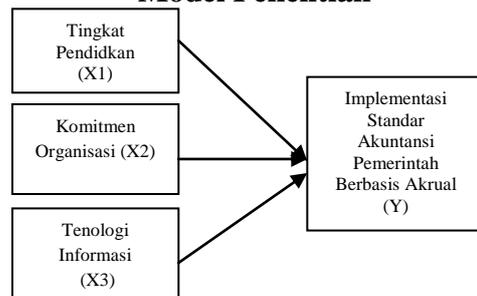
Studi ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan diminta untuk memfasilitasi dan mendukung pengenalan akuntansi akrual di sektor publik. Akibatnya, kualitas tinggi yang ada di dalam sistem informasi organisasi harus dipertimbangkan sebagai prasyarat penting dari keberhasilan pelaksanaan (Kusuma, 2013).

Argumen ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut :

H3 : Teknologi informasi berpengaruh terhadap SAP berbasis akrual.

Model Penelitian

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber: Data Olahan, 2016

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan pada SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan Sampel dipilih dengan kriteria yang menjadi pelaksana pengelolaan keuangan langsung yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 (seratus) orang dari 25 (Dua puluh lima) SKPD yang masing-masing SKPD ada 4 (empat) responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purpose*

sampling yaitu dengan menyebar kuisioner pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Y)

KSAP (2010) mendefinisikan kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagai kegiatan atau hal hal yang akan dipersiapkan pemerintah dalam rangka mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang sesuai dengan *roadmap* yang telah ditetapkan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrument yang dikeluarkan oleh KSAP (2010). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 4 (empat) item pertanyaan menggunakan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Tidak Tahu, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Tingkat Pendidikan (X1)

Tingkat pendidikan yang dimaksud pada penelitian ini adalah rata-rata tingkat pendidikan staf atau pegawai mulai dari jenjang menengah dibawah (SMA) hingga pasca sarjana (S2). Pengukuran variabel ini menggunakan instrument yang dikeluarkan oleh UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003. Pengukuran tingkat pendidikan dengan menggunakan skala 1 sampai 5 yang dimulai dari tingkat pendidikan yang rendah sampai tertinggi. Pengukurannya dengan 1= Pendidikan dibawah SMA, 2= SMA, 3= D-3, 4= S-1, 5= S-2.

Komitmen Organisasi (X2)

Menurut Kusuma (2013), komitmen adalah dukungan yang kuat dari pimpinan dan bawahan satuan kerja termasuk pimpinan SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantu. Komitmen juga bisa diartikan sebagai keinginan/kemauan yang kuat dari berbagai pihak yang ada di organisasi untuk menerapkan suatu kebijakan atau peraturan. Instrument pengukuran ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azhar (2007) dan Sulani (2009). Setiap responden diminta untuk menjawab 6 (enam) item pertanyaan menggunakan skala likert dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Tidak Tahu, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Teknologi Informasi (X3)

Teknologi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tersedianya teknologi informasi yang memadai, terintegrasi dan mudah digunakan. Juga mampu mengolah dan menyediakan data yang akurat dan terkini dalam kaitannya dengan penerapan sistem akuntansi akrual. Instrument pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azhar (2007) dan Sulani (2009). Setiap responden diminta untuk menjawab 6 (enam) pertanyaan menggunakan skala likert dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Tidak Tahu, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah

seluruh staf/pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rokan Hulu. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan secara langsung kepada pegawai yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rokan Hulu.

Kuesioner tersebut disebarkan pada 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rokan Hulu secara langsung. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 kuesioner atau sebesar 100 %. Kuesioner yang kembali sebanyak 88 buah atau sebesar 88%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 12 buah atau sebesar 12 %. Setelah dilakukan pengolahan data, seluruh kuesioner yang terkumpul dapat dianalisis sebanyak 88 atau sebesar 88%.

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang telah terkumpul yang mencakup perhitungan dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (Sugiyono, 2012:206).

Tabel 1
Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pendidikan	88	2	5	3.84	.709
Komitmen Organisasi	88	12	29	22.18	3.768
Teknologi Informasi	88	14	30	22.32	4.039
Implementasi SAP	88	10	20	15.11	2.246
Valid N (listwise)	88				

Sumber: Data Olahan, 2016

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner Ghazali (2011:52). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} , apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka variabel tersebut dikategorikan valid.

Uji Reliabilitas

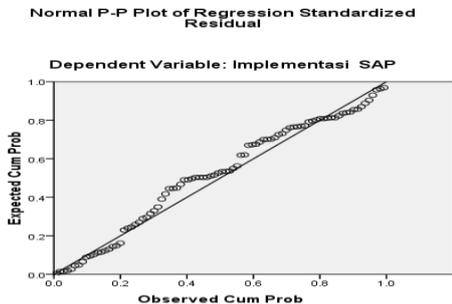
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap suatu pertanyaan pada kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas hanya dilakukan atas data yang telah diuji validitasnya dan dinyatakan valid. Suatu pengukur dapat dikatakan dapat diandalkan apabila memiliki koefisien *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika model regresi memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat grafik normal. Jika pola menunjukkan penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal mengindikasikan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan, 2016

Pada grafik normal *P-P Plot* penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*) atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Pengujian multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF). Suatu variabel dikatakan terbebas dari penyimpangan multikolinieritas, apabila nilai tolerance > 0,10, dan nilai VIF < 10.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas Data

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
Constant	2.519	.973		2.590	.011		
TP	2.092	.207	.661	10.111	.000	.824	1.214
KO	.093	.041	.155	2.234	.028	.727	1.376
TI	.112	.040	.202	2.831	.006	.691	1.448

a. Dependent Variable: Implementasi SAP

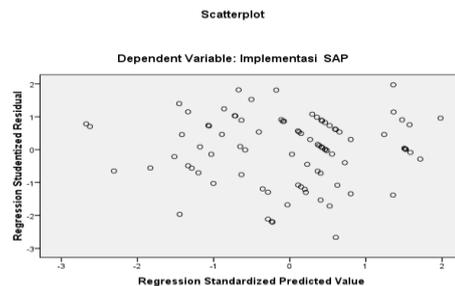
Sumber: Data Olahan, 2016

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF seluruh variabel < 10 dan tolerance > 0,10. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa tidak ada multikolonieritas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan varian dari residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Metode yang digunakan untuk mendeteksi heterokedastitas dapat dilakukan dengan melihat *Scatterplot*.

Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2016

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa *Scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebar). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi. Selain ini uji heterokedastisitas juga dapat menggunakan uji glejser, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastitas. Uji glejser adalah mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2013:142).

Tabel 3
Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	2.009	.563		3.567	.001
TP	.104	.120	.100	.870	.387
KO	-.046	.024	-.237	-1.925	.058
TI	-.019	.023	-.102	-.811	.419

a. Dependent Variable: ABS_RESID

Sumber: Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk variable tingkat pendidikan (X1) $0,387 > 0,05$, komitmen organisasi (X2) $0,058 > 0,05$, variabel teknologi informasi (X3) $0,419 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa pada uji ini menunjukkan tidak adanya heterokedasitas.

Uji Autokorelasi

Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), yaitu jika nilai DW terletak antara du dan $(4 - dU)$ atau $du \leq DW \leq (4 - dU)$, berarti bebas dari Autokorelasi. Jika nilai DW lebih kecil dari dL atau DW lebih besar dari $(4 - dL)$ berarti terdapat Autokorelasi. Nilai dL dan dU dapat dilihat pada tabel Durbin Waston, yaitu nilai dL ; $dU = \alpha$; n ; $(k - 1)$. Keterangan : n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf signifikan.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.839 ^a	.705	.694	1.242	2.058

a. Predictors: (Constant), TI, KO, TP

b. Dependent Variable: Implementasi SAP

Sumber: Data Olahan, 2016

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson model

adalah 2.058. Dari tabel Durbin Watson dengan $\alpha = 5\%$; $n = 88$; $(k - 1)$ didapatkan nilai dU 1,7243. Dari nilai tersebut diketahui bahwa $4-dU = 4-1,7243 = 2,2757$. dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai Durbin Watson 2,058 lebih besar dari 1,7243 dan lebih kecil dari 2,2757. Artinya tidak terjadi masalah autokorelasi pada model yang dibangun.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan presentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Presentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 2011:97).

Tabel 5
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.839 ^a	.705	.694	1.242	2.058

a. Predictors: (Constant), TI, KO, TP

b. Dependent Variable: Implementasi SAP

Sumber: Data Olahan, 2016

Hasil perhitungan analisis regresi diperoleh R^2 sebesar 0.705. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan, komitmen organisasi, dan teknologi informasi dapat menjelaskan variabel implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebesar 70,5%. Sedangkan sisanya 29,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak teramati dalam model penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode Regresi Linear berganda

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Model analisis berikut ini:
$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Impelementasi Akuntansi Berbasis Akruwal

X₁ = Tingkat pendidikan

X₂ = Komitmen Organisasi

X₃ = Teknologi informasi

α = Konstanta

β = koefisien regresi

e = Error

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

H₁ : Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Implementasi SAP Berbasis Akruwal

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $10,111 > 1,988$ dan $sig.t(0,000) < 0,05$ dengan demikian H₀₁ ditolak dan **Ha₁ diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal.

Hasil dari penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Supra (2016) yang menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal.

H₂ : Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap

Implementasi SAP Berbasis Akruwal

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,234 > 1,988$ dan $sig.t(0,028) < 0,05$ dengan demikian H₀₂ ditolak dan **Ha₂ diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal.

Hasil dari penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Sulani (2009) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ardiansyah (2013) yang mengatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruwal.

H₃ : Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Implementasi SAP Berbasis Akruwal

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,831 > 1,988$ dan $sig.t(0,006) < 0,05$ dengan demikian H₀₃ ditolak dan **Ha₃ diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal.

Hasil dari penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Supra (2016) yang menyatakan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal. Tetapi berbeda dengan peneltian yang

dilakukan Kusuma (2013) yang mengatakan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Itu dikarenakan objek yang diteliti Kusuma (2013) belum memiliki teknologi informasi yang memadai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada data yang telah dilakukan pengujian yang terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan yang sudah dimiliki pegawai pengelola keuangan di SKPD Kabupaten Rokan Hulu membantu pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hal ini berarti bahwa komitmen organisasi dari pegawai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah membantu pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hal ini berarti bahwa teknologi informasi yang sudah dimiliki oleh pegawai

pengelola keuangan di SKPD Kabupaten Rokan Hulu membantu pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Saran

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan dari hasil penelitian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya agar ruang lingkup sampel diperluas sehingga mungkin saja hasilnya berbeda.
2. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel independen seperti faktor perilaku, budaya organisasi dan motivasi untuk melihat lebih jelas pengaruhnya terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
3. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi pada Unit Kerja KPPN Malang)*. Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Azhar, 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Tesis. Pascasarjana

- Universitas Sumatera Utara.
Medan.
- Faradillah, Andi, 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*. Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*. BP Undip, Semarang.
- Hariyanto, Agus. (2012). Penggunaan Basis Akruwal dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. E-Jurnal STIE DharmaPutra Semarang, Vol 19, No. 36
- Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA*. Palembang. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2012. *Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kusuma, Muhammad Indra Yudha, 2013. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pemerintah pada pemerintah*. Semarang I: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP.
- KSAP. 2010. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah. Makalah disajikan dalam seminar pentahapan implementasi SAP akrual Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nazier, Daeng, 22 Juli 2009. *Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan*. Seminar Nasional.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung:Alfabeta.
- Sulani, A. Aldiani, 2009. *Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu*. Simposium Nasional XII, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Supra, Deswati, 2016. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi*

*Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah
Kabupaten Musi
Banyuasin. Jurnal
Akuntansi Politeknik
Sekayu (ACSY). Volume
V, No. 2. Agustus 2016 h.9-
23.*

Peraturan Republik Indonesia, 2005.
Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia,
2010. Undang-Undang
Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 tahun 2013
tentang Penerapan SAP
Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 20 tahun
2003 tentang sistem
pendidikan nasional